

# GEOPOLITIK IKN NUSANTARA:

*Simbol Strategis atau Proyek Geoekonomi Nasional*



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng:* Geopolitik IKN Nusantara - Simbol Strategis  
atau Proyek Geoekonomi Nasional?

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyc75@gmail.com](mailto:rudyc75@gmail.com)

13 Maret 2026

## **GEOPOLITIK IKN NUSANTARA: SIMBOL STRATEGIS ATAU PROYEK GEOEKONOMI NASIONAL?**



### **Geopolitik IKN Nusantara: Simbol Strategis atau Proyek Geoekonomi Nasional?**

#### **1. Pendahuluan**

Pertanyaan apakah IKN Nusantara merupakan **simbol strategis** atau **proyek geoekonomi nasional** sesungguhnya tidak dapat dijawab dengan pilihan biner yang terlalu sederhana. Secara historis, pemindahan ibu kota memang lahir dari imajinasi negara: membangun pusat pemerintahan baru yang lebih mencerminkan orientasi Indonesia sebagai negara kepulauan, mengurangi beban Jakarta, dan menegaskan arah pembangunan yang tidak lagi terlalu Jawa-sentris. Namun dalam perkembangan 2025–2026, IKN juga semakin jelas diposisikan sebagai **pusat pertumbuhan ekonomi baru**, dengan kluster industri, skema

investasi swasta dan KPBU, infrastruktur mixed-use, ekosistem pendidikan-kesehatan, dan target pembentukan “ibu kota politik” pada 2028. Karena itu, IKN bukan hanya lambang; ia juga dirancang sebagai instrumen penataan ulang geografi ekonomi Indonesia. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Secara hukum, proyek ini berdiri di atas **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara**, yang kemudian diubah dengan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023**. Dari sisi kebijakan pembangunan, Otorita IKN dan dokumen resmi pemerintah menempatkan Nusantara dalam horizon 2045 sebagai kota hijau, cerdas, berkelanjutan, sekaligus penggerak transformasi ekonomi Indonesia. Jadi sejak awal, landasan normatif IKN memang memadukan dua dimensi: dimensi **kenegaraan-politik** dan dimensi **ekonomi-transformasional**. ([Peraturan GO ID](#))

Tesis utama tulisan ini adalah sebagai berikut: **IKN Nusantara adalah simbol strategis yang sengaja digeoekonomikan**. Pada fase perumusan, aspek simbolik-politiknya sangat dominan karena proyek ini dipresentasikan sebagai koreksi atas sentralisme lama dan sebagai penanda Indonesia baru. Namun pada fase implementasi 2025–2026, watak geoekonominya semakin menonjol: investasi, konektivitas, hunian ASN, klaster ekonomi, kota cerdas, dan integrasi Balikpapan–Samarinda–Nusantara menjadi poros utama. Jadi, bila dipaksa memilih, IKN hari ini lebih tepat dibaca sebagai **proyek geoekonomi nasional yang memperoleh legitimasi dan daya dorong dari simbolisme strategisnya**.

## 2. Mengapa IKN Harus Dibaca Secara Geopolitik

Dalam studi geopolitik modern, ibu kota tidak pernah hanya berfungsi sebagai lokasi administrasi. Ibu kota adalah tempat di mana negara menampilkan dirinya kepada warganya sendiri dan kepada dunia luar. Ia menjadi pusat simbol, pusat keputusan, dan pusat representasi

kekuasaan. Karena itu, relokasi ibu kota pada dasarnya adalah tindakan geopolitik: negara memindahkan bukan hanya gedung, tetapi juga pusat gravitasi politik, citra masa depan, dan orientasi ruang nasionalnya. Ketika pemerintah Indonesia menegaskan bahwa IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi **Indonesia-sentris**, pernyataan itu secara implisit menyatakan bahwa lokasi ibu kota berhubungan langsung dengan imajinasi negara mengenai pusat dan pinggiran. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Dalam narasi resmi Otorita IKN, Nusantara tidak berdiri sendiri. Di dalam konfigurasi Kalimantan Timur, **IKN diposisikan sebagai "syaraf"**, Balikpapan sebagai "otot" dan simpul hilir migas-logistik, Samarinda sebagai "jantung", dan Kalimantan Timur sebagai "paru-paru". Bahasa ini sangat geopolitik. Ia menunjukkan bahwa IKN tidak didesain sebagai kota administratif yang terisolasi, melainkan sebagai inti dari sistem ruang baru yang menghubungkan fungsi pemerintahan, logistik, energi, pertanian, inovasi, dan wisata alam. Dengan kata lain, IKN dipikirkan sebagai alat untuk menata ulang hubungan antarwilayah di Indonesia Timur dan antara pusat dengan kawasan penopangnya. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Dimensi geopolitik lain terletak pada alasan pemindahan itu sendiri. Pemerintah sejak awal mengaitkan perpindahan ibu kota dengan beban Jakarta yang terlalu besar sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, bandar udara, dan pelabuhan. Dalam bahasa yang lebih konseptual, Jakarta dianggap telah mengalami **over-centralization**. Maka, relokasi ke Kalimantan Timur bukan hanya keputusan teknokratis, tetapi bentuk redistribusi pusat negara. Ini penting, sebab dalam geopolitik internal, lokasi pusat pemerintahan mencerminkan cara negara mendefinisikan keseimbangan antarwilayahnya. ([Reuters](#))

Dari sini terlihat bahwa membaca IKN hanya sebagai proyek properti, proyek konstruksi, atau proyek pemindahan ASN adalah pembacaan yang terlalu sempit. IKN adalah proyek spasial-politik: ia mencoba memindahkan jantung keputusan nasional ke tempat yang secara geografis lebih dekat dengan logika Indonesia sebagai kepulauan besar, sekaligus memberi sinyal bahwa pertumbuhan tidak harus selalu berpusat di Jawa. Maka, secara geopolitik, IKN mengandung pesan korektif terhadap sejarah pembangunan Indonesia sendiri. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### 3. IKN sebagai Simbol Strategis Negara

Bila kita bertanya mengapa IKN sering disebut sebagai proyek simbolik, jawabannya cukup jelas. Pertama, ia membawa **simbol de-Javaisasi terbatas** dalam politik pembangunan. Pemerintah menautkan IKN dengan pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam bahasa kebijakan, IKN hendak mengurangi persepsi bahwa seluruh pembangunan besar Indonesia selalu berujung di Pulau Jawa. Ini membuat IKN bukan sekadar lokasi baru, melainkan pernyataan politik tentang distribusi perhatian negara. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Kedua, IKN mengandung simbol **negara masa depan**. Situs resmi Otorita IKN menyebut Nusantara sebagai kota masa depan yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan, dengan pembangunan berlanjut hingga 2045. Otorita juga menyebut pembangunan IKN sebagai cerminan tekad bangsa untuk maju dan sebagai lambang keberhasilan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Symbolisme seperti ini penting, sebab proyek negara skala besar hampir selalu membutuhkan narasi masa depan untuk memperoleh legitimasi sosial dan politik. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Ketiga, IKN dipakai sebagai simbol **reformasi kelembagaan**. Pada Juni 2025, Otorita IKN menegaskan bahwa pembangunan Nusantara bukan

hanya soal infrastruktur dasar, melainkan penciptaan kota yang hidup, produktif, dan manusiawi; bahkan proyek ini disebut memperkuat posisi IKN sebagai simbol reformasi kelembagaan, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan representasi Indonesia masa depan yang berdaya saing global. Kalimat ini penting karena memperlihatkan bahwa bahkan dalam tahap implementasi, narasi simboliknya tetap dipelihara. IKN tidak disajikan hanya sebagai “tempat ASN pindah”, tetapi sebagai representasi tipe negara yang ingin dibangun Indonesia. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Keempat, simbolisme IKN juga tampak dalam ritus-ritus kenegaraan. Upacara 17 Agustus 2024 di kawasan IKN, kunjungan Presiden Prabowo pada Januari 2026, dan penekanan berulang bahwa Nusantara akan menjadi **ibu kota politik Indonesia pada 2028** semuanya memperlihatkan bahwa proyek ini terus dirawat sebagai simbol kontinuitas negara. Bahkan ketika belum seluruh fungsi negara berpindah, kehadiran presiden dan agenda kenegaraan di sana berfungsi membentuk persepsi bahwa Nusantara adalah pusat yang sedang “diresmikan secara bertahap” dalam imajinasi publik. ([Reuters](#))

Namun justru di sinilah letak persoalannya. Simbol, bila tidak diikuti fungsi, mudah berubah menjadi monumen politik yang mahal. Karena itu, nilai analitis IKN tidak berhenti pada makna simboliknya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah simbolisme tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam arsitektur ekonomi, tata ruang, dan kelembagaan yang fungsional? Di sinilah unsur geoekonomi masuk dan mengubah cara kita membaca IKN. ([Ibu Kota Nusantara](#))

#### **4. IKN sebagai Proyek Geoekonomi Nasional**

Secara konseptual, geoekonomi berarti penggunaan instrumen ekonomi, infrastruktur, investasi, teknologi, logistik, dan tata ruang untuk mencapai tujuan strategis negara. Bila memakai definisi ini, IKN jelas bergerak ke arah geoekonomi. Situs resmi IKN menyatakan bahwa

Nusantara akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, sedangkan dokumen dan materi resmi OIKN menggambarkan kota ini sebagai **superhub ekonomi**. Dalam kerangka itu, IKN bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simpul baru yang dirancang untuk memicu aktivitas ekonomi lintas-sektor dan lintas-wilayah. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Watak geoekonomi itu tampak jelas dari rancangan **enam klaster ekonomi** dan **dua klaster pendukung**. Otorita IKN menyebut enam klaster ekonomi tersebut mencakup industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan kimia dan produk turunannya, serta energi rendah karbon; dua klaster pendukungnya adalah pendidikan abad ke-21 dan smart city/industri 4.0. Dalam bahasa lain, IKN tidak dirancang semata sebagai kota birokrasi, tetapi sebagai ruang eksperimen ekonomi masa depan yang diharapkan menopang transformasi struktur ekonomi Indonesia. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Cara pandang ini juga tercermin dalam tahapan pembangunannya. Dalam cetak biru kota cerdas Nusantara, tahap 2025–2029 diarahkan agar infrastruktur utama siap dihubungkan dengan kawasan baru, transportasi umum primer dan sekunder mulai berfungsi, dan jumlah penduduk bertambah seiring tahap awal pembangunan universitas unggulan yang akan mendorong kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi menjelang 2035–2045. Ini memperlihatkan bahwa negara membaca IKN sebagai proyek **city-building** yang bertahap, bukan relokasi semalam. Kota ini diharapkan berkembang dari pusat pemerintahan ke pusat pengetahuan, inovasi, dan ekonomi berbasis teknologi.

Geoekonomi IKN juga terlihat dari integrasinya dengan kota-kota sekitar. Otorita menempatkan Balikpapan sebagai simpul hilir migas dan logistik, Samarinda sebagai pusat energi terbarukan, dan Kalimantan Timur

sebagai penguat pertanian hulu dan wisata alam. Dengan demikian, Nusantara diposisikan sebagai inti yang mengoordinasikan rantai nilai regional, bukan sebagai entitas yang berdiri lepas dari hinterland-nya. Secara geoekonomi, ini sangat penting: kota baru hanya akan berfungsi bila ia memiliki jaringan produksi, logistik, layanan, dan pasar tenaga kerja yang lebih luas daripada batas administratifnya sendiri. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **5. Bukti Implementasi: Dari Simbol ke Ekosistem**

Perkembangan 2025–2026 memperlihatkan bahwa IKN mulai bergerak dari tahap simbolik ke tahap ekosistem. Pada Juni 2025, Otorita IKN untuk pertama kalinya mengeksekusi proyek pembangunan secara langsung melalui tender terbuka dan seleksi. Paket ini mencakup tujuh pekerjaan fisik peningkatan jalan di KIPP 1B–1C sepanjang total 12,2 km senilai Rp3,04 triliun, ditambah dua paket pengawasan. Pada saat yang sama, OIKN juga menandatangani kerja sama dengan 16 tenant dari berbagai sektor layanan sehari-hari. Artinya, yang dibangun bukan hanya jalan dan kantor, tetapi juga fondasi kehidupan perkotaan. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Lebih penting lagi, OIKN secara eksplisit menyebut area 1B–1C seluas sekitar 6.700 hektare akan difungsikan untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas kota berkonsep mixed-use, dan bahwa pembukaan akses tersebut diharapkan menjadi pemicu investasi baru. Pernyataan ini sangat penting untuk membaca arah proyek: negara tidak sedang membangun “kota monofungsi” yang hanya aktif pada jam kantor. Negara sedang berusaha membangun ruang urban yang hidup, yang bisa menarik investasi, penduduk, dan layanan. Ini adalah logika geoekonomi yang sangat jelas. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Pada sisi investasi, pergeserannya juga tampak. Renstra OIKN 2025–2029 mencatat bahwa hingga akhir 2024, delapan tahap groundbreaking telah menghasilkan realisasi investasi swasta dan BUMN sebesar **Rp58,36**

**triliun**. Sementara itu, *Nusantara Investment Update* edisi Oktober 2025 menyebut OIKN telah mengantongi **komitmen investasi Rp225,02 triliun**, terdiri dari **Rp66,3 triliun investasi swasta** dan **Rp158,72 triliun melalui skema KPBU** untuk infrastruktur dan hunian. Bahkan pada Maret 2025, lima investor baru menandatangani pemanfaatan lahan dengan total nilai **Rp2,42 triliun** di City Hall Nusantara. Data-data ini menunjukkan bahwa pembiayaan IKN memang didorong ke arah kombinasi APBN, swasta, dan PPP/KPBU—ciri khas proyek geoekonomi, bukan sekadar proyek simbolik negara.

IKN juga mulai menunjukkan tanda sebagai ruang administrasi yang benar-benar dihuni. Pada Januari 2026, lebih dari **1.100 pegawai Otorita IKN** mengikuti apel perdana di KIPP Nusantara, dan OIKN menyebut momentum itu sebagai penguatan kesiapan menuju Nusantara sebagai pusat pemerintahan 2028. Pada Februari 2026, OIKN menyatakan pelayanan dasar untuk perpindahan ASN terus dipercepat; di KIPP sudah tersedia empat rumah sakit, tiga di antaranya telah beroperasi, sekolah terpadu disiapkan, layanan BPJS tersedia, dan operasional Masjid Negara direncanakan pada 2026. Ini berarti IKN mulai bergerak dari “proyek konstruksi” menjadi “ekosistem administratif-perkotaan”. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Karena itu, bila seseorang masih menyebut IKN murni simbolik, penilaian itu semakin sulit dipertahankan. Simbol memang tetap ada, tetapi tanda-tanda pembentukan fungsi ekonomi dan fungsi kota juga makin konkret. Dengan kata lain, IKN mulai memperoleh apa yang dalam teori pembangunan wilayah disebut **materiality**: proyek itu tidak hanya diceritakan, tetapi mulai dihuni, dilayani, dan dihubungkan dengan investasi nyata. ([Ibu Kota Nusantara](#))

## 6. Mengapa Geoekonomi Menjadi Kunci Pembacaan

Pertanyaan inti pengguna—simbol strategis atau proyek geoekonomi—menjadi lebih tajam bila kita menilai apa yang menjadi **mesin**

**pendorong keberlanjutan** proyek. Simbol dapat meluncurkan proyek, tetapi simbol saja tidak cukup untuk memeliharanya. Yang menentukan keberlanjutan IKN justru adalah kemampuan proyek ini menciptakan logika ekonomi: arus investasi, nilai tambah kawasan, ekosistem bisnis, konektivitas logistik, hunian, pendidikan, kesehatan, serta peluang bagi masyarakat lokal. Karena itu, begitu pembangunan masuk ke fase 2025–2029, pembacaan geoekonomi menjadi semakin dominan.

Hal ini terlihat dari cara OIKN mengomunikasikan proyek kepada investor. Dalam berbagai materi investasi, pemerintah menekankan kepastian percepatan, pengembangan menuju ibu kota politik 2028, serta komitmen investasi yang telah terkumpul. Bahkan regulasi seperti **Perpres 79/2025** dipromosikan sebagai pemberi sinyal kepastian kepada masyarakat, pelaku usaha, dan investor agar tidak meragukan kelanjutan proyek. Bahasa seperti ini adalah bahasa geoekonomi: negara sadar bahwa masa depan IKN tidak hanya ditentukan oleh legitimasi politik, tetapi juga oleh persepsi pasar terhadap kepastian regulasi, pembiayaan, dan keberlanjutan proyek. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Lebih jauh, IKN didesain untuk menciptakan **pusat pertumbuhan baru** di luar Jawa. Bappenas sejak awal menekankan tujuan besar IKN untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, mengembangkan superhub dengan enam klaster ekonomi, dan menjadikan pembangunan IKN sebagai salah satu penggerak ekonomi regional dan nasional. Bila ditarik ke level makro, ini berarti IKN diharapkan menjalankan fungsi seperti yang pernah dimainkan kota-kota baru besar di banyak negara: menjadi node baru bagi investasi, diversifikasi ekonomi, dan redistribusi aktivitas produktif. ([Bappenas](#))

Dari sudut pandang itu, IKN bukan hanya proyek pemindahan pusat politik, melainkan proyek **rekayasa ulang peta pertumbuhan nasional**. Negara berupaya memindahkan sebagian aktivitas bernilai tinggi—pemerintahan, layanan publik, pendidikan, riset, kesehatan, dan sektor

ekonomi prioritas—ke wilayah yang selama ini bukan pusat dominan. Itu sebabnya istilah geoekonomi lebih tepat daripada sekadar ekonomi biasa. Yang diubah bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga **geografinya**. ([Ibu Kota Nusantara](#))

## 7. Argumen yang Mendukung Pembacaan “Simbol Strategis”

Meskipun demikian, pembacaan simbolik belum kehilangan relevansinya. Ada beberapa alasan. Pertama, negara masih sangat menekankan **fungsi representasional** IKN. Narasi “kota masa depan”, “simbol keberhasilan”, “representasi Indonesia masa depan”, dan “pusat peradaban baru” menunjukkan bahwa proyek ini masih beroperasi kuat di wilayah makna. Dalam politik, wilayah makna tidak bisa diabaikan, sebab proyek besar memerlukan narasi kebangsaan untuk memperoleh daya hidup jangka panjang. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Kedua, hingga awal 2026, pemindahan total pusat pemerintahan belum selesai. Reuters mencatat bahwa target Jokowi memindahkan pemerintah pada akhir 2024 tidak tercapai, dan pemerintah Prabowo kemudian menegaskan kembali komitmennya, dengan fasilitas eksekutif disebut siap dan gedung legislatif-yudikatif ditargetkan selesai pada 2028. Fakta ini menunjukkan bahwa IKN masih berada dalam fase transisi: ia belum sepenuhnya menjadi pusat politik operasional, sehingga unsur simbolik tetap menonjol dalam cara publik memandangnya. ([Reuters](#))

Ketiga, banyak tindakan politik di sekitar IKN masih bersifat sangat simbolik: kunjungan presiden, penegasan dukungan DPR, seruan transformasi ASN, dan penggunaan IKN sebagai ikon modernitas Indonesia. Ini bukan hal remeh. Dalam studi negara, simbolisme sering kali mendahului institusionalisasi penuh. Negara terlebih dahulu menciptakan “kehadiran simbolik” agar kemudian fungsi administratif dan ekonomi dapat menyusul. IKN tampaknya bergerak dengan pola seperti itu. ([Reuters](#))

Jadi, argumen yang menyebut IKN sebagai simbol strategis tidak salah. Hanya saja, ia menjadi tidak cukup jika berhenti di sana. Simbol memang penting untuk menjelaskan legitimasi politik IKN, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa negara menata kluster ekonomi, menyiapkan PPP, membangun layanan kota, dan mengejar investasi dengan sangat intensif. ([Ibu Kota Nusantara](#))

## **8. Argumen yang Mendukung Pembacaan “Proyek Geoekonomi Nasional”**

Bila harus memilih penekanan yang lebih kuat untuk fase sekarang, saya cenderung menyebut IKN sebagai **proyek geoekonomi nasional**. Ada beberapa alasan utama.

Pertama, instrumen yang paling ditekankan sekarang adalah instrumen ekonomi: investasi, KPBU, lahan, jalan, hunian, layanan dasar, dan penyiapan kawasan mixed-use. Bahkan OIKN mengomunikasikan capaian lewat angka investasi, tindak lanjut MoU, dan progres pembangunan infrastruktur. Dalam Renstra 2025–2029, OIKN sendiri mengakui bahwa kinerja tindak lanjut MoU investasi melampaui target, sedangkan indikator pendanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi target. Bahasa evaluasi seperti ini menunjukkan bahwa proyek IKN kini dikelola dengan logika pembangunan ekonomi-institusional, bukan hanya logika simbolik.

Kedua, pembangunan fisiknya secara eksplisit diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Paket jalan di 1B–1C dirancang membuka akses ke kawasan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas kota mixed-use agar memicu investasi berikutnya. Ini sangat khas geoekonomi: infrastruktur dipakai sebagai alat untuk membentuk arus modal dan aktivitas produktif. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Ketiga, superhub ekonomi dengan enam kluster menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar “pusat pemerintahan yang kebetulan punya mal dan

hotel”, tetapi kota yang sejak desainnya sudah diikat pada agenda transformasi ekonomi. Enam klaster tersebut diarahkan ke sektor-sektor bernilai tambah, hijau, dan berorientasi masa depan. Artinya, fungsi ekonominya bukan aksesori; ia adalah bagian inheren dari desain IKN. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Keempat, keterkaitan dengan Balikpapan, Samarinda, dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa negara berusaha membangun **regional economic system**, bukan kawasan administratif tertutup. Ini menjadikan IKN sebagai proyek geoekonomi nasional, karena dampak yang diharapkan tidak berhenti pada kawasan KIPP, tetapi merembet ke koridor ekonomi lebih luas di Kalimantan dan Indonesia Timur. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Karena itu, pembacaan paling tepat adalah bahwa IKN saat ini sedang bertransisi dari **high-symbol politics** menuju **structured geoeconomic project**. Simbol politiknya belum hilang, tetapi mesin utamanya kian bersifat ekonomi-spasial. ([Ibu Kota Nusantara](#))

## **9. Kendala Nyata: Mengapa Proyek Ini Belum Bisa Dianggap Selesai**

Meski demikian, menyebut IKN sebagai proyek geoekonomi nasional bukan berarti semua prasyarat keberhasilannya telah terpenuhi. Justru sebaliknya, ada sejumlah kendala yang menunjukkan bahwa transformasi dari simbol ke fungsi masih penuh tantangan.

Tantangan pertama adalah **ruang fiskal**. Reuters melaporkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui anggaran **Rp48,8 triliun hingga 2029** untuk proyek IKN, sekitar 60 persen dari belanja yang dikeluarkan era Jokowi pada 2022–2024. Reuters juga mencatat defisit anggaran 2025 berada di **2,92 persen PDB**, dekat dengan batas legal 3 persen. Ini berarti IKN bergerak dalam ruang fiskal yang lebih ketat daripada fase sebelumnya. Konsekuensinya, dorongan pada investasi swasta dan KPBU bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan struktural. ([Reuters](#))

Tantangan kedua adalah **kepastian hukum investasi**, terutama soal tanah. Mahkamah Konstitusi pada November 2025 menafsirkan ulang ketentuan hak atas tanah di IKN dan menghapus skema yang secara efektif memungkinkan akumulasi hingga 190 tahun. Putusan itu menegaskan bahwa daya tarik investasi tidak boleh dibangun di atas pengaturan yang bertentangan dengan konstitusi, dan bahwa kepastian hukum, keadilan, kesederhanaan administrasi, dan pengurangan biaya ekonomi tinggi juga penting untuk iklim investasi. Putusan ini punya dua implikasi. Di satu sisi, ia mengurangi daya tarik rezim sangat-longgar bagi investor tertentu. Di sisi lain, ia memaksa proyek IKN berdiri di atas dasar hukum yang lebih sehat. ([MKRI.ID](https://www.mkri.id))

Tantangan ketiga adalah perbedaan antara **komitmen investasi** dan **realisasi investasi**. OIKN memang melaporkan komitmen investasi Rp225,02 triliun pada Oktober 2025, tetapi realisasi swasta non-APBN hingga September 2025 yang disebut OIKN sendiri adalah Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa jalan dari komitmen ke realisasi masih panjang. Dalam proyek sebesar IKN, yang menentukan bukan hanya banyaknya MoU, tetapi kecepatan proyek benar-benar dibangun, beroperasi, dan menarik aktivitas lanjutan.

Tantangan keempat adalah **pembangunan sosial dan penerimaan lokal**. OIKN mulai menekankan layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, tempat ibadah, dan beasiswa bagi warga delineasi IKN. Penekanan ini sendiri menunjukkan bahwa pemerintah sadar kota baru tidak bisa hanya dibangun dari beton dan investasi; ia harus membangun legitimasi sosial dan kapasitas SDM lokal. Jika tidak, IKN berisiko menjadi enclave modern yang berdiri di tengah ketimpangan sosial kawasan. ([Ibu Kota Nusantara](https://www.ibukotanusantara.go.id))

## **10. Apakah IKN Lebih Banyak Simbol atau Lebih Banyak Geoekonomi?**

Setelah menimbang semua unsur di atas, saya berpendapat bahwa jawaban paling tepat adalah: **IKN bermula sebagai simbol strategis, tetapi keberlanjutannya kini ditentukan oleh logika geoekonomi nasional.** Tanpa simbol strategis, proyek ini mungkin tidak akan lahir. Tetapi tanpa geoekonomi, proyek ini tidak akan bertahan.

Simbol strategis menjelaskan **mengapa** negara merasa perlu memindahkan pusatnya: koreksi atas Jakarta-sentrisme, pesan Indonesia-sentris, representasi negara masa depan, dan distribusi baru pusat-pinggiran. Namun geoekonomi menjelaskan **bagaimana** proyek itu hendak diwujudkan: kluster ekonomi, konektivitas, pengembangan mixed-use, KPBU, investasi swasta, layanan dasar, dan integrasi kawasan. Jika simbol adalah sumber legitimasi awal, maka geoekonomi adalah mekanisme keberlanjutannya. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Karena itu, membenturkan keduanya seolah-olah harus memilih salah satu justru menyesatkan. IKN adalah proyek yang berada di titik temu antara **state symbolism** dan **national geoeconomic engineering**. Yang berubah hanyalah bobot keduanya menurut fase. Pada fase gagasan dan mobilisasi politik, simbol strategis mendominasi. Pada fase 2025–2026, ketika pembahasan beralih ke investasi, tender jalan, hunian ASN, rumah sakit, sekolah, dan kepastian regulasi, bobot geoekonominya makin besar. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Dengan kata lain, IKN bukan sekadar ibu kota yang dipindahkan; ia adalah upaya negara **menciptakan ruang baru tempat politik, ekonomi, dan citra masa depan disatukan.** Dalam bahasa yang lebih ringkas: IKN bukan simbol *atau* geoekonomi, melainkan simbol yang dijalankan melalui geoekonomi. ([Ibu Kota Nusantara](#))

## 11. Implikasi bagi Masa Depan Indonesia

Bila pembacaan ini benar, maka keberhasilan IKN tidak boleh diukur hanya dari kapan seluruh kementerian pindah. Ukuran yang lebih tepat adalah apakah Nusantara berhasil menjadi: satu, pusat pemerintahan

yang fungsional; dua, pusat pertumbuhan ekonomi baru; tiga, simpul integrasi Kalimantan Timur dan Indonesia Timur; dan empat, model kota yang tidak jatuh menjadi enclave elite. Ini berarti ukuran keberhasilan IKN harus mencakup **fungsi administratif, kedalaman ekonomi, keterhubungan regional, dan inklusivitas sosial.** ([Ibu Kota Nusantara](#))

Implikasi kedua adalah bahwa IKN akan terus menjadi arena uji bagi kualitas tata kelola Indonesia. Putusan MK soal hak atas tanah memperlihatkan bahwa negara tidak bisa hanya mengandalkan insentif besar untuk menarik investor; negara juga harus menyediakan kepastian hukum, keadilan, dan administrasi yang baik. Jadi masa depan IKN akan sangat ditentukan bukan hanya oleh crane dan beton, tetapi oleh mutu institusi yang mengelolanya. ([MKRI.ID](#))

Implikasi ketiga, secara geopolitik internal, IKN akan menjadi indikator apakah Indonesia benar-benar mampu menjalankan proyek pemerataan yang selama puluhan tahun hanya menjadi slogan. Bila IKN hanya memindahkan elit birokrasi tanpa memindahkan pusat peluang, maka ia akan berhenti sebagai simbol. Tetapi jika ia berhasil membentuk koridor ekonomi baru yang menguntungkan kawasan sekitarnya, maka ia akan menjadi salah satu eksperimen geoekonomi paling penting dalam sejarah Indonesia modern. ([Ibu Kota Nusantara](#))

## 12. Penutup

Pada akhirnya, **Geopolitik IKN Nusantara** paling tepat dipahami sebagai proyek yang menggabungkan logika **simbol strategis** dan **geoekonomi nasional**, tetapi dengan kecenderungan yang kini makin bergeser ke geoekonomi. Simbol strategisnya jelas: membangun pusat negara baru, mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan menampilkan visi Indonesia 2045 yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Namun tahap implementasi menunjukkan bahwa proyek ini semakin ditentukan oleh hal-hal yang sangat konkret: investasi, jalan,

hunian, rumah sakit, sekolah, KPBU, kepastian tanah, dan integrasi koridor Balikpapan–Samarinda–Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Karena itu, bila pertanyaannya adalah **“Simbol strategis atau proyek geoekonomi nasional?”**, jawaban saya adalah: **IKN adalah simbol strategis pada tingkat narasi, tetapi proyek geoekonomi nasional pada tingkat operasional.** Symbolismenya memberi makna; geoekonominya memberi daya hidup. Tanpa simbol, IKN kehilangan legitimasi kebangsaannya. Tanpa geoekonomi, IKN kehilangan masa depannya. Dan justru di antara keduanya, kita bisa memahami mengapa Nusantara menjadi salah satu proyek negara paling ambisius—dan paling menentukan—dalam Indonesia kontemporer. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Tentu. Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka gaya APA 7** untuk makalah **“Geopolitik IKN Nusantara: Simbol Strategis atau Proyek Geoekonomi Nasional?”**

## **Glosarium**

### **IKN Nusantara**

Ibu kota negara baru Republik Indonesia yang dibentuk untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan baru yang mendukung transformasi ekonomi nasional dan orientasi pembangunan yang lebih Indonesia-sentris. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Otorita IKN**

Lembaga otoritatif yang bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, dan penyelenggaraan IKN Nusantara, termasuk

perencanaan, investasi, layanan dasar, dan koordinasi pembangunan lintas sektor. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Simbol strategis**

Dalam konteks IKN, istilah ini merujuk pada fungsi Nusantara sebagai lambang arah baru negara: pemerataan pembangunan, pengurangan beban Jakarta, penegasan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, dan representasi Indonesia masa depan. Ini merupakan inferensi yang ditopang oleh narasi resmi OIKN dan kebijakan IKN. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Geoekonomi**

Pendekatan yang menggunakan instrumen ekonomi, investasi, infrastruktur, tata ruang, dan konektivitas untuk mencapai tujuan strategis nasional. Dalam kasus IKN, geoekonomi tampak pada penataan kluster ekonomi, pembangunan mixed-use, skema KPBU, dan integrasi kawasan Balikpapan–Samarinda–Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Pusat pertumbuhan ekonomi baru**

Peran IKN sebagai simpul baru aktivitas ekonomi nasional di luar Jawa, yang diharapkan menggerakkan investasi, layanan, inovasi, dan konektivitas wilayah di Kalimantan Timur serta Indonesia bagian timur. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan)**

Zona inti IKN yang menjadi lokasi bangunan pemerintahan utama, fasilitas dasar, dan pengembangan kawasan perkotaan awal. Pembangunan jalan, hunian, layanan publik, dan fasilitas mixed-use banyak difokuskan di area ini. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha)**

Skema pembiayaan dan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan badan usaha swasta untuk menyediakan infrastruktur publik. Dalam IKN, KPBU menjadi instrumen penting untuk mengurangi tekanan APBN dan mempercepat pembangunan. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Investasi swasta murni**

Penanaman modal oleh pelaku usaha tanpa pembiayaan APBN langsung. OIKN menempatkan investasi swasta sebagai pilar penting keberlanjutan pembangunan IKN. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Superhub ekonomi**

Konsep yang menempatkan IKN sebagai pusat integrasi kegiatan ekonomi masa depan, didukung oleh klaster industri, pendidikan, kesehatan, smart city, energi rendah karbon, dan konektivitas regional. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Klaster ekonomi IKN**

Kelompok sektor prioritas yang dikembangkan untuk menopang geoekonomi Nusantara, termasuk teknologi bersih, farmasi, pertanian berkelanjutan, wisata dan kesehatan, bahan kimia turunannya, serta energi rendah karbon. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Ibu kota politik 2028**

Target yang berulang kali ditegaskan pemerintah dan OIKN bahwa Nusantara diharapkan berfungsi sebagai pusat politik Indonesia pada 2028, terutama setelah penyelesaian fasilitas legislatif dan yudikatif. ([Reuters](#))

### **Perpres 79 Tahun 2025**

Peraturan presiden yang oleh OIKN diposisikan sebagai instrumen penguat kepastian kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN, khususnya untuk memberi sinyal kepercayaan kepada investor dan publik. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Hak atas tanah di IKN**

Pengaturan tentang jangka waktu dan pemberian hak atas tanah untuk investasi di kawasan IKN. Mahkamah Konstitusi pada November 2025 menegaskan bahwa pengaturan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pemberian hak efektif dua siklus sekaligus hingga 190 tahun. ([MKRI.ID](#))

### **Mixed-use development**

Pengembangan kawasan yang menggabungkan fungsi permukiman, layanan publik, pendidikan, kesehatan, komersial, dan mobilitas dalam satu ekosistem perkotaan. Konsep ini tampak pada pengembangan area 1B–1C di KIPP IKN. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Indonesia-sentris**

Orientasi pembangunan yang menekankan pemerataan antarwilayah dan tidak lagi berpusat secara berlebihan pada Jawa. Dalam diskursus IKN, istilah ini menjadi dasar simbolik sekaligus strategis dari pemindahan ibu kota. ([Ibu Kota Nusantara](#))

### **Daftar Pustaka (APA 7)**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022, March 11). *Bappenas tekankan tujuan besar IKN untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045.*

([Bappenas](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, November 13). *Land rights periods in the IKN Law no longer two cycles.* ([MKRI.ID](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (n.d.). *Tentang IKN.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). *Cetak biru kota cerdas Nusantara.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025, March 18). *5 investor baru total investasi Rp 2,42 triliun menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan ADP Otorita IKN di City Hall.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025). *Nusantara investment update: October 2025.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025). *Nusantara investment update: December 2025.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Geopolitik IKN Nusantara - Simbol Strategis  
atau Proyek Geoekonomi Nasional?*

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025, October 10). *Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025–2029.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2026, January 5). *Apel perdana 2026, Otorita IKN tegaskan transformasi ASN menuju ibu kota politik 2028.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2026, February 9). *Otorita IKN pastikan pelayanan dasar siap sambut perpindahan ASN.* ([Ibu Kota Nusantara](#))

Peraturan.go.id. (2023, October 31). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.* ([Peraturan GO ID](#))

Reuters. (2025, January 21). *Indonesia's President Prabowo to spend \$3 bln on new capital city through 2029.* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, January 13). *Indonesia's Prabowo affirms commitment to new capital city in first visit as president.* ([Reuters](#))

---

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 13 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69b363a2-f8c0-839c-9567-4273c1136a9a>